

# Perubahan Paradigma dalam Kurikulum Pendidikan Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar terhadap Metode Pengajaran dan Evaluasi

Renova Manullang\*, Charoline Renta Anggriani Marpaung

Universitas Jambi

**Abstrak:** Penyesuaian kurikulum dilakukan secara metodis untuk mencerminkan kemajuan teknologi dan waktu. Sekolah sering kali mengubah sejumlah kebijakannya untuk mematuhi peraturan baru dan agar lebih sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Kurikulum 2013 mengalami beberapa modifikasi sebelum diganti dengan kurikulum darurat yang digunakan sesuai dengan keadaan dan mencakup sejumlah keterampilan yang dianggap dapat dicapai. Kajian ini berkonsentrasi pada penerapan paradigma pendidikan baru dan justifikasinya untuk mengetahui dampak paradigma baru tersebut. Teknik kualitatif dikombinasikan dengan strategi deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan merupakan hasil investigasi dan review dari banyak sumber independen kebijakan kurikuler. Untuk mengumpulkan data, berbagai buku dan artikel yang menerapkan kurikulum otonom dianalisis, dan makalah dari banyak studi perpustakaan diperiksa. Setelah pengumpulan data, data dianalisis menggunakan model analisis Miles yang terdiri dari tiga tahap: pengumpulan data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan tinjauan literatur secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk menerapkan kurikulum otonom ini diperlukan sosialisasi yang progresif.

**Kata Kunci:** Kurikulum Pendidikan Merdeka, Paradigma

DOI: <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i4.488>

\*Correspondence: Renova Manullang

Email: [renovamanullang05@gmail.com](mailto:renovamanullang05@gmail.com)

Received: 28-04-2024

Accepted: 19-05-2024

Published: 05-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Curriculum adjustments are made methodically to reflect advances in technology and time. Schools often change some of their policies to comply with new regulations and to better suit their unique needs. The 2013 curriculum underwent several modifications before being replaced with an emergency curriculum which was used according to the circumstances and included a number of skills that were considered achievable. This study concentrates on the implementation of the new educational paradigm and its justification to determine the impact of the new paradigm. Qualitative techniques combined with descriptive strategies were used in this research. The data sources used are the results of investigations and reviews from many independent sources of curricular policies. To collect data, various books and articles implementing autonomous curriculum were analyzed, and papers from many library studies were examined. After data collection, the data was analyzed using the Miles analysis model which consists of three stages: data collection, data verification, and drawing conclusions based on a comprehensive literature review. This is done to make it easier for researchers to draw conclusions. The results show that implementing this autonomous curriculum requires progressive socialization.

**Keywords:** Independent Education Curriculum, Paradigm

## Pendahuluan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah kumpulan rencana dan pengaturan yang menetapkan tujuan, pokok bahasan, dan bahan pengajaran serta teknik-teknik yang hendak diterapkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan tertentu. tujuan pendidikan. Pemerintah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar dan menengah, dan setiap satuan pendidikan mengembangkannya sesuai dengan relevansinya. Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tumbuhnya religiusitas dan agama, cita-cita Pancasila, potensi siswa, IQ dan minat, variasi potensi daerah dan lingkungan, serta kebutuhan kemajuan teknologi. Pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan, dan muatan lokal semuanya diwajibkan di sekolah dasar dan menengah. Meskipun epidemi masih kuat pada akhir Agustus 2021, pemerintah mengumumkan rencana untuk menerapkan kurikulum darurat yang lebih sederhana. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 memuat kebijakan tersebut. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk menyederhanakan kurikulum 2013 secara sepihak dengan menggunakan kurikulum darurat. Menurut (Puskurbuk, 2020), persiapan dokumen administrasi masih menjadi tantangan bagi instruktur Indonesia.

Menurut penelitian dari (Aeini, 2019), guru tidak termotivasi untuk membuat rencana pembelajaran karena mereka lebih menghargai pengajaran langsung daripada membuat rencana pembelajaran yang rumit. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan program pembelajaran satu hari yang dirancang untuk mencapai Kompetensi Dasar berdasarkan kurikulum. Namun pada praktiknya, guru masih belum mampu menulis RPP yang dapat diterima. Untuk memenuhi kebutuhan siswa dan memungkinkan mereka mencapai kompetensi yang dibutuhkan, kurikulum harus dapat disesuaikan sebaik mungkin. Menurut penelitian Li dkk. (2021), penilaian pembelajaran pada masa pandemi menghasilkan beberapa rekomendasi kurikulum yang dapat menyesuaikan dengan keadaan masa kini tanpa membebani siswa dalam belajar. Penerapan kurikulum di Indonesia perlu diperbaiki dan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan masa kini guna meningkatkan hasil belajar siswa, berdasarkan temuan beberapa evaluasi dan kajian (Kemdikbudristek, n.d.).

Beberapa ide panduan terlibat dalam pembuatan kurikulum otonom, khususnya: 1) Konsep konsentrasi, stabilitas, dan koherensi menjadi pertimbangan dalam persyaratan keberhasilan suatu disiplin ilmu; 2) kapasitas untuk menularkan kemampuan transdisipliner dan alternatifnya; dan 3) keaslian, kemampuan beradaptasi, dan keselarasan; dan selain itu 4) keterlibatan, pemberdayaan atau kemandirian siswa, dan pemberdayaan atau kemandirian guru. Konsep kemandirian belajar yang menjadi landasan kebijakan pendidikan lainnya yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020–2024 menjadi landasan utama terciptanya kurikulum otonom. Tujuan dari perubahan paradigma tersebut adalah untuk menuntut keseragaman proses

pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan Indonesia, melepaskan kendali terhadap standar-standar yang mengikat, dan meningkatkan otonomi guru sebagai pemegang kendali dalam proses pembelajaran.

Dengan menerapkan kurikulum otonom ini, hak dan kapasitas peserta untuk mengarahkan pembelajaran mereka melalui penetapan tujuan, evaluasi diri, dan tindakan proaktif dan akuntabel pada akhirnya akan terwujud. Artinya, agar efektivitas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, pengajar sendiri juga harus mampu mengatur proses pembelajaran dengan baik. Mustafa dan Fatma (2016) Selain empat prinsip yang digariskan dalam penerapan kurikulum mandiri, proses perancangan kurikulum berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: kesederhanaan, kemudahan pemahaman dan penerapan, penekanan pada karakter dan kompetensi siswa, fleksibilitas, keselarasan, kolaborasi, dan perhatian pada temuan studi dan umpan balik. Hal ini disebut dengan kurikulum otonom atau pengertian belajar mandiri dalam revisi kurikulum saat ini.

Menurut (Ainia, 2020), kurikulum kemandirian belajar ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, simbol nasional pendidikan, yang menekankan kebebasan belajar secara kreatif dan mandiri. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan rasa mandiri. Selain itu, terdapat sejumlah kebijakan kurikulum yang bersifat otonom, seperti penyederhanaan, penggantian ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter, serta konversi USBN menjadi asesmen kompetensi. Tiga komponen tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian harus dituangkan dalam satu halaman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang sebelumnya diwajibkan sepanjang 20 halaman (Wijaya dkk., 2020).

## Metode

Boleh dikatakan bahwa metodologi penelitian yang dominan pada program studi Administrasi Pendidikan adalah penelitian kualitatif atau dikenal dengan teknik kualitatif. Pendekatan ini sangat disukai oleh siswa. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa instrumen pengujian statistik dan data numerik tidak banyak berpengaruh pada penelitian kualitatif. Jika peneliti kualitatif hanya menggunakan deskripsi fenomena, maka peneliti kuantitatif harus mahir dalam bidang statistik. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang, statistik sering kali merupakan kutukan. Lebih lanjut, diketahui pula bahwa mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan yang berlatar belakang pendidikan ilmu sosial kurang menguasai matematika dibandingkan mahasiswa pada bidang eksakta (Handoko et al., 2024).

Fleksibilitas pendekatan kualitatif untuk mengubah konteks pendidikan dengan cepat adalah manfaat lain dari penggunaan pendekatan tersebut. "Penelitian kualitatif menawarkan kebebasan untuk merespons dan mengeksplorasi wawasan yang relevan dalam situasi yang berkembang," klaim Patton (2002). mendorong keteraturan dan fleksibilitas dalam penelitian."

Dalam kaitannya dengan multikulturalisme, pendekatan kualitatif merupakan cara yang efektif untuk mengkaji sudut pandang lain. sesuai dengan pernyataan yang dibuat

oleh Johnson dan Christensen (2008). "Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengakui dan menghargai keragaman budaya, membuka jendela terhadap pandangan yang mungkin diabaikan dalam penelitian kuantitatif." (Handoko et al., 2024).

Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian deskriptif yang dilakukan. Dengan menggunakan makalah terkait dan buku pegangan kurikulum independen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penelitian ini bertujuan untuk merangkum temuan dalam bentuk paradigma kurikulum independen (Faiz & Kurniawaty, 2020). Sumber data yang digunakan merupakan hasil investigasi dan review dari banyak sumber independen kebijakan kurikuler. Untuk mengumpulkan data, berbagai buku dan artikel yang menerapkan kurikulum otonom dianalisis, dan makalah dari banyak studi perpustakaan diperiksa. Di internet dicari studi literatur dengan menggunakan frase kurikulum mandiri. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis Miles, yang terdiri dari tiga tahap: pengumpulan data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan tinjauan literatur secara menyeluruh (Huberman, 2014). Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kurikulum Pendidikan Merdeka

Menurut etimologi, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani *curir* yang berarti pelari dan *curare* yang berarti perlombaan. Selain itu, kata "kurikulum" tampaknya berasal dari dunia atletik Yunani dan Romawi, yang berarti jarak. Jarak dalam konteks ini mengacu pada keseluruhan jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari awal hingga akhir (Bahri, 2017). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (KEMENDIKBURISTEK) menetapkan kurikulum merdeka belajar yang berpedoman pada Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BSNP. Hal ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai upaya ekstra untuk digunakan dalam rangka pemulihan pembelajaran pada tahun 2022–2024.

Salah satu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat adalah kurikulum pembelajaran otonom. Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Teknologi, meluncurkan kurikulum dalam upaya menilai kemajuan kurikulum 2013. Sebelum pandemi melanda Indonesia, Kurikulum 2013 berfungsi sebagai satu-satunya kurikulum yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pandemi Covid-19, yang menciptakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi siswa selama menempuh pendidikan, menjadi inspirasi di balik kurikulum pembelajaran mandiri. Kurikulum 2013 yang selama ini diterapkan dalam proses pendidikan selanjutnya diringkas menjadi kurikulum darurat yang berfungsi untuk memudahkan pengelolaan pembelajaran oleh satuan pendidikan.

Berikut ini rincian perbedaan Kurikulum Belajar Mandiri dengan kurikulum sebelumnya yang digunakan pada pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan perguruan tinggi:

1. Tingkat Sekolah Dasar: Untuk menerapkan kurikulum pembelajaran otonom, IPA dan IPS digabungkan menjadi satu topik yang disebut "Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial," dan bahasa Inggris, yang dulunya merupakan mata pelajaran utama, kini menjadi pilihan.
2. Tingkat Sekolah Menengah Disiplin teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pertama kali ditawarkan sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum studi otonom, namun sekarang menjadi mata pelajaran wajib bagi semua siswa sekolah menengah.
3. Kelas SMA/SMK. Peminatan bahasa, IPS, dan sains tidak lagi dimasukkan dalam kurikulum untuk belajar mandiri. Model pembelajaran kemudian lebih mudah dibuat pada tingkat SMK, dimana 70% topiknya adalah vokasi dan 30% sisanya bersifat umum. Selanjutnya seperti halnya mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi diharapkan mampu membuat barang berbentuk karangan ilmiah pada tingkat SMA dan SMK. Siswa hendaknya mampu berpikir kritis, analitis, dan ilmiah setelah membaca ini.
4. Peningkatan Pembelajaran Dengan kurikulum pembelajaran otonom, siswa memiliki akses tidak terbatas terhadap berbagai aktivitas pembelajaran berdasarkan minat mereka, apa pun rencana studinya. Berbagai strategi, antara lain penelitian, kewirausahaan, pertukaran pelajar, magang, KKN, dan proyek individu, dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut.

Ada empat kebijakan yang berlaku dalam Program Merdeka Belajar, yaitu: kebijakan Ujian Nasional Berbasis Standar Nasional (USBN), kebijakan UN, perubahan kebijakan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan siswa zonasi baru. Berikut ini sekali lagi rangkuman keempat kebijakan tersebut, secara spesifik:

Tahun 2020 akan ada USBN pertama. sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian. Ayat 1 Pasal 2 menyatakan bahwa "Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran". Kemudian ditambahkan pasal 5 ayat 1 yang memperjelas "bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa portofolio, tugas, tes tertulis, dan bentuk kegiatan lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi. diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan." Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa "Kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan/program pendidikan yang bersangkutan" merupakan penegasan yang pasti akan hal itu. Guru dan sekolah diperbolehkan melakukan evaluasi hasil belajar siswa sesuai dengan kebijakan ini (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Yang kedua adalah Ujian Nasional, yang biasa dilalui siswa pada akhir setiap tahun ajaran; Namun, Ujian Nasional terakhir dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh karena itu, frasa "Ujian Nasional" pada tahun 2021 akan diganti dengan "Penilaian Kompetensi Minimal" (AKM) yang mengukur kemampuan siswa dalam berbahasa dan membaca.

Sistem AKM berbeda dengan UN karena hanya diperuntukkan bagi siswa kelas 4, 8, dan 11, sedangkan UN diberikan kepada siswa pada tingkat akhir. Tujuannya adalah untuk memotivasi para pendidik dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan lingkungan belajar bagi setiap siswa guna meningkatkan standar pengajaran.

Ketiga, pembuatan Rencana Penyelenggaraan Pembelajaran sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 yaitu tentang RPP yang disederhanakan. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk memilih, memanfaatkan, dan membuat RPP yang telah disediakan sebelumnya. Guru memiliki keleluasaan karena hal ini didasarkan pada kebutuhan masing-masing siswa, dan kebutuhan berfluktuasi antar individu dan lembaga pendidikan. Diperkirakan bahwa dengan membuat rencana pembelajaran lebih sederhana, instruktur akan memiliki lebih banyak kelonggaran dalam menyusunnya, sehingga memungkinkan keterlibatan yang lebih dinamis, aktif, dan tidak terlalu ketat.

Keempat, PPDB Zonasi dapat disesuaikan ketika pertama kali dilaksanakan, sehingga mempertimbangkan perbedaan dalam aksesibilitas dan kualitas sekolah di berbagai wilayah. Batas zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah; yang terpenting adalah warga masyarakat dapat bersekolah di sekolah terbaik tanpa mengalami diskriminasi. Setiap siswa dapat dibentuk oleh kurikulum individu untuk dapat mempengaruhi masyarakat dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul.

## **B. Dampak Perubahan Paradigma terhadap Guru Sekolah Dasar**

Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan pergeseran paradigma adalah dengan pergeseran cara pandang tentang proses pembelajaran. Salah satu dari sekian banyak perspektif yang berkembang adalah bagaimana masyarakat memandang peran guru. Menurut Prof. Dr. Sudarwan Danin (2005), telah terjadi perubahan paradigma pendidikan dimana akademisi kini diharapkan berperan sebagai fasilitator pembelajaran atau trainer bukan sekedar pemberi pengetahuan.

Tanggung jawab pendidik adalah mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menciptakan makna pada siswanya. Kemampuan merancang proses pembelajaran yang berkembang dari penguasaan topik hingga pembelajaran dari hasil merupakan prasyarat bagi pendidik dan peserta didik (PBL). Pertanyaan apakah materi yang harus dipelajari siswa akan berguna bagi mereka di masa depan sama pentingnya dengan seberapa banyak materi yang harus mereka pelajari. Profesor I. Wayan Subagia, Ph.D. mengklaim bahwa guru yang dulunya berperan sebagai sumber belajar, kini telah berkembang menjadi orang tua, anggota masyarakat, dan model perilaku yang memfasilitasi pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya.

Karena kurikulum bervariasi secara berkala tergantung pada keadaan, guru sekolah dasar sering kali mengadopsi kurikulum otonom. Salah satu pilihan untuk menyelaraskan tujuan pendidikan Indonesia dengan standar internasional tanpa mengorbankan ciri-ciri

Pancasila adalah kurikulum otonom ini. Kurikulum operasional satuan pendidikan akan menentukan bagaimana kurikulum otonom akan dilaksanakan di sekolah dasar.

Pergeseran paradigma dalam kurikulum otonom di sekolah dasar telah didokumentasikan dalam sejumlah penelitian sebelumnya, dan transisi ini berdampak baik pada strategi pengajaran guru. Meskipun terdapat banyak kesulitan, penerapan kurikulum otonom di sekolah dasar sebagian besar dimungkinkan berkat keterlibatan guru dan pemahaman menyeluruh terhadap gagasan ini. Menurut (Ariga, 2023), agar implementasi kurikulum dapat berjalan semulus mungkin, pengajar harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum setiap saat. Hal ini mencakup kemampuan transisi dari prinsip pembelajaran ke proses evaluasi dan membina hubungan positif antara orang tua, guru, dan siswa.

Selain itu, dikatakan oleh (Isa et al., 2022) bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam mengaktifkan seluruh sumber daya sekolah untuk efektivitas implementasi kurikulum otonom. Kerja sama yang efektif antara pendidik, administrator, dan personel sekolah lainnya sangat penting untuk pelaksanaan kurikulum otonom yang efisien di kelas.

Guru harus beradaptasi dengan kurikulum baru yang merupakan modifikasi sistem pendidikan secara bertahap. Menurut (Marengke, 2019), perubahan paradigma atau sistem pendidikan selalu berkorelasi dengan metode pengorganisasian kompetensi guru. Baik pada tingkat konseptual maupun operasional, kompetensi guru dikaitkan dengan kegiatan pendidikan. Menurut penelitian Kasnowo dan Hidayat (2022), instruktur profesional adalah mereka yang terbuka untuk beradaptasi dengan ide-ide baru bahkan rela meninggalkan metode-metode kuno demi menghadapi isu-isu masa kini seperti modifikasi kurikulum otonom terkini.

Sikap guru harus berubah untuk menerapkan kurikulum otonom; ide-ide yang sudah ketinggalan zaman harus ditolak, dan kompetensi harus diperkuat. Menurut (Annisa Alfath et al., 2022), peningkatan mutu pendidikan akan diupayakan dengan mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, guna menyambut program belajar mandiri. Agar penerapan kurikulum otonom di sekolah dasar dapat memberikan dampak positif dengan adanya pergeseran paradigma guru yang biasa terjadi, maka diperlukan adanya penerapan kurikulum otonom di sekolah dasar.

## **Simpulan**

Bagi guru sekolah dasar, paradigma kurikulum mandiri merupakan hal baru. Kurikulum 2013 digantikan dengan kurikulum yang beroperasi secara otonom, yang merupakan perkembangan yang benar-benar baru. Kurikulum pascapandemi yang dikenal dengan kurikulum otonom akan diadopsi sepenuhnya di lembaga pendidikan. Implementasi terbatas dari program ini telah dilakukan di berbagai tingkatan, termasuk sekolah dasar. Hal ini terbukti dari temuan penelitian akademis mengenai kurikulum yang mungkin digunakan di berbagai wilayah di Indonesia. Para guru mempersiapkan diri untuk menerapkan kurikulum otonom ini dengan menghadiri berbagai sesi pelatihan dan

lokakarya yang ditawarkan oleh organisasi publik dan swasta. Hal ini membantu mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kurikulum.

Karena salah satu prinsip fleksibilitas adalah memberikan kebebasan kepada instruktur untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutuhan siswa dan demi kepentingan terbaik mereka, guru sekolah dasar menerima penerapan kurikulum ini. Salah satu hasil perubahan kurikulum yang diterapkan adalah terbentuknya kurikulum otonom. Masih terdapat sejumlah hambatan praktis dan substantif di sektor ini. Karena mereka sudah familiar dengan keadaan kelas, guru memainkan peranan penting dalam menerapkan kurikulum operasional sekolah. Banyak lembaga pendidikan yang mulai menggunakan kurikulum otonom.

Hasilnya menunjukkan bahwa untuk menerapkan kurikulum otonom ini diperlukan sosialisasi yang progresif. Hasil wawancara yang biasanya belum sampai pada tahap penyiapan perangkat yang akan diterapkan pada kurikulum mandiri nantinya merupakan salah satu aspek dari kurikulum mandiri sekolah dasar yang masih terbatas kemampuannya untuk diidentifikasi oleh peneliti selama penelitian. proses. Hal ini penting karena mempersiapkan kurikulum melibatkan lebih dari sekedar mempelajari apa yang dipikirkan oleh instruktur dan administrator tentang gagasan untuk memperkenalkan kurikulum otonom.

## Daftar Pustaka

- Aeini, K. (2019). The Implementation of Curriculum 2013 Revision on Lesson Plans Made by English Teachers of SMAN 2 Magelang in School Year 2018/2019. *Journal of Research on Applied Linguistics, Language, and Language Teaching*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.31002/jrlt.v2i1.424>
- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Aisyah, L., Rizqia, F. N. R., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Paulo Freire. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 162–172.
- Alfath, A., Azizah, F. N., & Setiabudi, D. I. (2022). Pengembangan Kompetensi Guru dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i2.73>
- Ariga, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.225>
- Astutik, D., Yuhastina, Y., Ghufonudin, G., & Parahita, B. N. (2022). Guru dan Proses Pendidikan dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 46–54. <https://doi.org/10.24246/j.js.2022.v12.i1.p46-54>

- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia's Learning Profiles Between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, 85(April), 102436. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436>
- Cheung, A. C. K., & Man Wong, P. (2012). Factors Affecting the Implementation of Curriculum Reform in Hong Kong. *International Journal of Educational Management*, 26(1), 39–54. <https://doi.org/10.1108/09513541211194374>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(2), 155–164. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2410>
- Fullan, M. (2006). *Advance Praise for the New Meaning of Educational Change* (4th ed.).
- Gopal, R., Singh, V., & Aggarwal, A. (2021). Impact of Online Classes on the Satisfaction and Performance of Students During the Pandemic Period of COVID-19. *Education and Information Technologies*, 26(6), 6923–6947. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10523-1>
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Isa, I., Asrori, M., & Muharini, R. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(6). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4175>
- Kasnowo, K., & Hidayat, M. S. (2022). Penguatan Kompetensi SDM Guru melalui Kurikulum Merdeka di SDN Jatirejoyoso. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i3.251>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. *Lembaran Negara RI*, 53(9), 1689–1699.
- Kholisdinuka, A. (2020). Lebih dari Guru Biasa, Guru Penggerak Kemendikbud Bakal Punya Tugas Ini. <https://news.detik.com>.
- Marengke, M. (2019). Konsep Pengembangan Kompetensi Guru. *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 11(2). <https://doi.org/10.46339/foramadiahi.v11i2.227>
- Pratiwi, I., & Utama, B. (2020). Kesenjangan Kualitas Layanan Pendidikan di Indonesia pada Masa Darurat Covid-19: Telaah Demografi atas Implementasi Kebijakan Belajar dari

---

Rumah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 81.  
<https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.539>

Puskurbuk. (2020). Laporan Kinerja Pusat Kurikulum dan Perbukuan Tahun 2020.

Rozandy, M. P., & Koten, Y. P. (2021). Susunan Staf Redaksi. *Jurnal IN CREATE*, 8, 11–17.

Saputra, D. T., Kartika, R. C., & Sumardjoko, B. (2024). Perubahan Paradigma Guru dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan*, 33(1), 469–476.

Trebeck, K., Higgins, B., Aaron, H., & Murdie, A. (2021). Welsh Government, Education, Education Wales, et al. Curriculum (Re) Design: A Series of Thematic Reports from the OECD Education 2030 Project. Overview Brochure. OECD ILibrary, 53.